



Kontribusi Hukum Islam terhadap Reformasi Birokrasi: Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Efisien, Efektif, dan Berkualitas

Supono¹, Mukti Fajar Nur Dewata²

¹Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,

E-mail: ppatsuponosh@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, E-mail: muktifajar@umy.ac.id

Abstract

Islam has an important role in realizing bureaucratic reform towards efficient, effective, and quality public services. Islamic values such as trustworthiness, professionalism, accountability, transparency, and justice must be the moral foundation for the bureaucratic apparatus in carrying out their duties. This research aims to look at the strategic role of Islam in encouraging bureaucratic reform in Indonesia. The research method used is To get concrete results in this study, the author uses a type of library research with a normative juridical approach. Data sources are obtained through searching literature related to problems, laws and regulations, and an explicit description of all existing problems. The results of the research show that First, Islam teaches the principles of good governance, such as trustworthiness, professionalism, and accountability. Second, Islam emphasizes the importance of transparency and community participation in the decision-making process. Third, Islam encourages the creation of public services that are fair and on the side of the people. The application of Islamic values in the bureaucracy can increase public trust in the government and encourage the creation of quality public services. This article also provides some recommendations to strengthen the role of Islam in bureaucratic reform in Indonesia.

Keywords: *Islam, Bureaucratic Reform, Public Service*

Abstrak

Agama Islam memiliki peran penting dalam mewujudkan reformasi birokrasi menuju pelayanan publik yang efisien, efektif, dan berkualitas. Nilai-nilai Islam seperti amanah, profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, dan keadilan harus menjadi landasan moral bagi aparatur birokrasi dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini bertujuan melihat peran strategis agama Islam dalam mendorong reformasi birokrasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah Untuk mendapatkan hasil yang konkrit dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data diperoleh melalui penelusuran terhadap literatur yang berkaitan dengan permasalahan, peraturan perundang-undangan, serta penguraian seluruh masalah yang ada secara eksplisit. Hasil penelitian menunjukkan ada Pertama, Islam mengajarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti amanah, profesionalisme, dan akuntabilitas. Kedua, Islam menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Ketiga, Islam mendorong terciptanya pelayanan publik yang adil dan berpihak kepada rakyat. Penerapan nilai-nilai Islam dalam birokrasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendorong terciptanya pelayanan publik yang berkualitas. Artikel ini juga memberikan beberapa rekomendasi untuk memperkuat peran agama Islam dalam reformasi birokrasi di Indonesia.

Kata Kunci: *Agama Islam, Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik*

1. Pendahuluan

Reformasi birokrasi merupakan langkah strategis dalam upaya memperbaiki kualitas pemerintahan dan pelayanan publik di Indonesia. Dalam menghadapi berbagai tantangan, birokrasi diharapkan tidak hanya berjalan dengan mekanisme yang ada, tetapi juga harus terus berkembang dan berinovasi.¹ Birokrasi yang efektif dan efisien sangat diperlukan untuk menciptakan pemerintahan yang responsif dan akuntabel. Untuk itu, birokrasi harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi, baik dalam teknologi, regulasi, maupun kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik menjadi kunci utama dalam mewujudkan birokrasi yang modern dan dinamis.² Selain itu, penerapan prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas juga menjadi faktor penting dalam mendukung reformasi birokrasi.³ Dengan demikian, reformasi birokrasi tidak hanya berfokus pada perbaikan sistem dan prosedur, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, budaya kerja, dan etika pelayanan publik. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, efisien, dan efektif.⁴

Reformasi birokrasi di Indonesia menjadi agenda penting yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Agustiawan dan Abdul Halim, proses reformasi ini dipicu oleh kritik masyarakat terkait dengan buruknya kinerja pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang ada, yang memaksa adanya perubahan menuju sistem yang berbasis kinerja.⁵ Masyarakat menuntut transparansi dan peningkatan layanan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan mereka. Oleh karena itu, pemerintah perlu secara proaktif tidak hanya merespon keluhan, tetapi juga mengidentifikasi peluang untuk berinovasi dan melakukan peningkatan yang berkelanjutan⁶. Pemerintah harus mengembangkan mekanisme yang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi menjadi alat penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.⁷ Melalui pendekatan yang komprehensif dan terstruktur, diharapkan

¹ Hendra Nugroho Saputro, *Inovasi Pelayanan Pada Organisasi Publik*, *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, vol. 26, 2023, <https://doi.org/10.31845/jwk.v26i1.823>.

² Amri Dunan, "Government Communications in Digital Era: Public Relation and Democracy," *Journal Pekommas* 5, no. 1 (2020): 71, <https://doi.org/10.30818/jpkm.2020.2050108>.

³ Ita Hartati, "Strategi Pembangunan Sdm Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Era Disrupsi 4.0," *Jurnal BPPK : Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan* 13, no. 1 (2020): 109–29, <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v13i1.493>.

⁴ Adyawardan, A. (2021). The Challenges of Public Innovation: Insights From Risk Governance in Batang Regency. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)/JKAP. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 25(1), 1-1. <https://doi.org/10.22146/jkap.62314>

⁵ Vani Wirawan, "Penerapan E-Government Dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer Di Indonesia," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, no. 1 (2020): 1–16, <https://doi.org/10.18196/jphk.1101>.

⁶ Optimization of Public Services. (2023). <https://ojs.unimal.ac.id/ijpas/article/viewFile/12328/5110>

⁷ Tunggal Prasodjo, "Paradigma Humanis Dalam Pelayanan Publik," *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 7, no. 1 (2017): 38, <https://doi.org/10.26858/jiap.v7i1.3438>.

reformasi birokrasi dapat menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, efisien, dan efektif, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.⁸ Inovasi dalam pelayanan publik, pelatihan berkelanjutan bagi pegawai negeri, dan peningkatan integritas serta etika kerja menjadi pilar utama dalam upaya reformasi ini. Dengan demikian, reformasi birokrasi bukan hanya soal perubahan prosedur, tetapi juga perubahan budaya kerja dan sikap mental aparatur negara.⁹

Melalui upaya reformasi birokrasi yang komprehensif, pemerintah Indonesia bertujuan untuk memastikan agar birokrasi tidak hanya menjadi lebih efisien dan efektif, tetapi juga lebih inklusif dan adaptif dalam menghadapi tantangan masa kini dan mendatang. Langkah ini diharapkan dapat membawa perubahan yang positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.¹⁰ Reformasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perbaikan sistem dan prosedur kerja, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, hingga penerapan teknologi informasi yang lebih canggih untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah juga berkomitmen untuk menciptakan birokrasi yang responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat, dengan membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas.¹¹ Selain itu, reformasi ini menekankan pentingnya nilai-nilai integritas dan etika kerja dalam setiap lini pemerintahan, sehingga dapat mengurangi praktik-praktik korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan reformasi birokrasi tidak hanya memperbaiki kinerja pemerintah, tetapi juga memberikan dampak nyata dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik dan, pada akhirnya, meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.¹²

Sejalan dengan hal tersebut, birokrasi modern dituntut untuk lebih adaptif terhadap perubahan dan lebih terbuka terhadap cara-cara baru dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja.¹³ Transformasi ini tentunya harus didukung oleh infrastruktur yang memadai, sistem pengelolaan yang baik, dan sumber daya manusia yang kompeten. Dalam era digital saat ini, penerapan teknologi informasi dan komunikasi menjadi sangat krusial untuk mendukung operasional birokrasi yang cepat dan tepat.¹⁴ Selain itu, pelatihan berkelanjutan bagi aparatur sipil negara diperlukan untuk memastikan

⁸ Prasodjo.

⁹ Rohman, M N., & Rismana, D. (2021). Kebijakan Pemangkasan Struktur Birokrasi di Indonesia. *Volksgeist*, 4(2), 201-232. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i2.5232>

¹⁰ Nissim Cohen and Uri Hertz, "Street-Level Bureaucrats' Social Value Orientation On and Off Duty," *Public Administration Review* 80, no. 3 (2020): 442–53, <https://doi.org/10.1111/puar.13190>.

¹¹ Ragil Fitri Rahayu and Ibrahim Ibrahim, "Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka," *Jurnal Studi Inovasi* 3, no. 1 (January 30, 2023): 118–31, <https://doi.org/10.52000/jsi.v3i1.128>.

¹² Farhan Rahmawan Halim, Feni Astuti, and Khaerul Umam, "Implementasi Prinsip Agile Governance Melalui Aplikasi PIKOBAR Di Provinsi Jawa Barat," *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik* 7, no. 1 (2021): 48–67.

¹³ Imansyah Abinda Firdaus and Arnidiana Arnidiana, "Strategi Kota Bekasi Dan Kota Jambi Dalam Pengembangan Inovasi Digital Dan Kreativitas Masyarakat," *Jurnal Studi Inovasi* 1, no. 1 (January 29, 2021): 22–27, <https://doi.org/10.52000/jsi.v1i1.4>.

¹⁴ Dien Novita, "Faktor-Faktor Penghambat Pengembangan E-Government," *Eksplora Informatika* 4, no. 1 (2014): 43–52, <https://eksplora.stikom-bali.ac.id/index.php/eksplora/article/view/94>.

mereka memiliki kompetensi dan kemampuan yang sesuai dengan tuntutan zaman. Birokrasi modern juga harus mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakannya, sehingga dapat membangun kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan.¹⁵ Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat lebih mudah mengakses dan mengawasi kinerja pemerintah, yang pada gilirannya akan mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan responsif. Kolaborasi antara berbagai sektor, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, juga menjadi kunci penting dalam mendorong reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan birokrasi modern tidak hanya mampu mengatasi tantangan saat ini, tetapi juga siap menghadapi dinamika masa depan yang terus berkembang.¹⁶

Krisis ekonomi 1997 yang bertransformasi menjadi krisis multidimensi di tahun 1998 memicu tuntutan reformasi dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Tuntutan ini didasari keinginan luhur untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan mempercepat kesejahteraan rakyat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.¹⁷ Gelombang reformasi pertama pun dimulai, membawa perubahan penting di berbagai bidang, seperti politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi. Untuk mewujudkan hal itu, telah ditetapkan beberapa Tap MPR RI, di antaranya : Tap MPR RI Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional, Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Tap MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, Tap MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Tap MPR RI Nomor II/MPR/2002 yang mengamanatkan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional termasuk reformasi birokrasi dan membangun penyelenggaraan negara dan dunia usaha yang bersih, Tap MPR RI Nomor VI/MPR/2002 yang mengamanatkan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, penegakan dan kepastian hukum, serta reformasi birokrasi dengan penekanan pada kultur birokrasi yang transparan, akuntabel, bersih dan bertanggungjawab, serta dapat menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara.¹⁸

¹⁵ Aymen Asif and Kashif Rathore, "Behavioral Drivers of Performance in Public-Sector Organizations: A Literature Review," *SAGE Open* 11, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.1177/2158244021989283>.

¹⁶ Wiryanto, W. (2020). Population Administration Service Innovation in Indonesia During the Covid-19 Pandemic. *Proceedings IAPA Annual Conference*, 512-512. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2020.425>

¹⁷ Danar Ilham Kurniawan, Akbar Maulana, and Itok Wicaksono, "Agile Governance Sebagai Bentuk Transformasi Inovasi Pemerintah Daerah," *Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Jember*, 2021, 1–9.

¹⁸ Egarvanda Sayuri, "Transformasi Digital, Pelayanan Publik Di Masa Pandemi," *Ekasakti Educational Journal* 1, no. 2 (2021): 278–92.

Reformasi birokrasi di Indonesia memang mengalami perjalanan yang panjang. Dimulai dari ketertinggalannya dibanding sektor lain pada gelombang pertama, tekad untuk mengejar ketertinggalan itu muncul di tahun 2004 dengan fokus pada penerapan prinsip *clean government* dan *good governance*.¹⁹ Upaya ini ditandai dengan program pembangunan aparatur negara melalui reformasi birokrasi yang menargetkan komitmen penuh dari seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah di tahun 2011. Harapannya, pada tahun 2014 proses reformasi birokrasi sudah berjalan dan mengakar kuat, sehingga pada tahun 2025 cita-cita untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dan berintegritas tinggi dapat tercapai.

Reformasi birokrasi yang sukses akan membawa berbagai dampak positif. Penyalahgunaan kewenangan publik oleh oknum pejabat dapat diminimalisir dan dihilangkan.²⁰ Birokrasi yang efisien dan efektif akan meningkatkan mutu pelayanan publik serta perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program. Efisiensi biaya dan waktu dalam setiap tugas organisasi akan tercapai. Pada akhirnya, birokrasi Indonesia akan menjadi lebih antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan lingkungan strategis, sehingga Indonesia dapat menjadi negara dengan birokrasi paling maju.²¹ Di sisi lain, nilai-nilai moral dan spiritual memainkan peran penting dalam membangun birokrasi yang tidak hanya bertumpu pada aspek teknis, tetapi juga memiliki komitmen kuat terhadap etika dan integritas. Agama Islam, yang memiliki peranan fundamental dalam kehidupan masyarakat Indonesia, menawarkan sumber nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai ini dapat menjadi pedoman dalam bertindak, sehingga lahir kebijakan dan tindakan yang tidak hanya legal, tapi juga legitimet.²²

Integrasi nilai-nilai Islam ke dalam pembangunan birokrasi modern merupakan langkah penting menuju sistem pemerintahan yang adil dan mementingkan kesejahteraan umum.²³ Nilai-nilai ini memberikan fondasi moral yang kuat, membantu memerangi korupsi, dan memastikan bahwa pemerintahan bekerja untuk kepentingan seluruh rakyat. Dengan adanya nilai-nilai tersebut, diharapkan setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh birokrasi akan mencerminkan prinsip keadilan dan kesejahteraan umum sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya, penerapan nilai Islam di dalam birokrasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan memperhatikan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan, diharapkan setiap layanan

¹⁹ Alan Zarychta, Tara Grillos, and Krister P. Andersson, "Public Sector Governance Reform and the Motivation of Street-Level Bureaucrats in Developing Countries," *Public Administration Review* 80, no. 1 (2020): 75–91, <https://doi.org/10.1111/puar.13132>.

²⁰ Anugrah Asmarani, "Analisis Akuntabilitas Birokrasi Pemerintahan: Studi Kasus Dalam Meningkatkan Efektivitas Layanan Publik," 2023, 1–38.

²¹ Usy Tiaranika and Maesaroh Maesaroh, "Inovasi Pelayanan Superone (Surat Pengantar Online) Di Kecamatan Candisari Kota Semarang," *Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 2, no. 2 (2020): 160–75, <https://doi.org/10.14710/dialogue.v2i2.9942>.

²² Muchtarom, M., & Selamat, A Z. (2023). Civic values: Thematic studies on citizenship in Islam. *Jurnal Civics/Jurnal civics*, 20(1), 135-144. <https://doi.org/10.21831/jc.v20i1.58544>

²³ Pinilih, S A G., & Hikmah, S N. (2018). AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA TERHADAP HAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERIBADAH DI INDONESIA. *Masalah-masalah hukum*, 47(1), 40-40. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.40-46>

yang diberikan mencapai standar yang tinggi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.²⁴ Hal ini tidak hanya memperkuat hubungan antara pemerintah dan warganya, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi pelayanan publik.²⁵

Kemudian, integrasi nilai-nilai Islam ini juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi aparatur negara untuk melakukan tugas-tugasnya dengan efektif. Dengan adanya prinsip transparansi dan akuntabilitas, setiap pengambilan keputusan dan implementasi tindakan diharapkan bebas dari praktik korupsi. Ini membawa birokrasi Indonesia lebih dekat ke model pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, yang menjadi salah satu aspek penting dari pemerintahan yang baik. Akhirnya, melalui integrasi nilai-nilai Islam, diharapkan terwujudnya pemerintahan yang baik yang sesuai dengan cita-cita masyarakat Indonesia. Hal ini memberikan ruang bagi pengembangan pemerintahan yang tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga memperhatikan prosesnya sehingga selaras dengan budaya dan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat.²⁶

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran agama Islam dalam mewujudkan reformasi birokrasi. Kajian ini akan menyoroti bagaimana reformasi birokrasi dapat mencapai pelayanan publik yang lebih efisien, efektif, dan berkualitas tinggi. Dalam konteks ini, reformasi birokrasi bukan hanya tentang perubahan struktural, tetapi juga tentang integrasi nilai-nilai agama ke dalam praktik kebijakan dan manajemen publik. Nilai-nilai Islam seperti amanah, yang merupakan ketulusan dan kepercayaan, memiliki peran penting dalam mendukung profesionalisme di lingkungan kerja. Konsep amanah menekankan pentingnya bertanggung jawab dan dapat diandalkan dalam menjalankan tugas. Nilai-nilai ini, ketika diadopsi oleh aparatur sipil, dapat membawa perubahan signifikan dalam cara kerja dan pengambilan keputusan dalam birokrasi.²⁷ Maka dari itu penelitian ini tertarik untuk melihat Bagaimana nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan ke dalam praktik reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik? Dan, sejauh mana penerapan nilai-nilai Islam dapat membawa perubahan signifikan dalam birokrasi di Indonesia?

2. Metode Penelitian

²⁴ Siregar, F Y. (2020). Perception of Public Islam on Performance and Providing Public Services in Padangsidempuan City. *Al-Lubb/al-Lubb*, 2(1), 78-78. <https://doi.org/10.51900/lubb.v2i1.8591>

²⁵ Ovie Yanti, "Transformasi Pelayanan Publik Digital Di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan e-Government Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Jambi," *Jurnal Paradigma Ekonomika* 17, no. 3 (2022): 2085–1960.

²⁶ Haryanti, A S., Samosir, A., & Nafilah, I. (2018). Pemberdayaan Relawan Balaraja melalui Pelatihan Menulis Karya Ilmiah dan Menulis Sastra. *Deleted Journal*, 1(03), 191-191. <https://doi.org/10.30998/jurnalpkm.v1i03.2550>

²⁷ Rosilawati, Y., & Amanullah, F M. (2021). Cultivating an Attitude of Professionalism Based on Prophetic Value. *Edukasi: Jurnal Pendidikan Islam/Edukasi: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 139-152. <https://doi.org/10.54956/edukasi.v9i2.31>

Untuk mendapatkan hasil yang konkrit dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data diperoleh melalui penelusuran terhadap literatur yang berkaitan dengan permasalahan, peraturan perundang-undangan, serta penguraian seluruh masalah yang ada secara eksplisit. Sebagai penguat, penulis juga mengambil beberapa keterangan dari responden. Metode analisis yang digunakan adalah deduktif, yakni menarik kesimpulan dari uraian yang bersifat umum ke khusus, sehingga hasil penelitian ini mudah dipahami oleh setiap pembaca. Dalam kaitannya dengan kontribusi hukum Islam terhadap reformasi birokrasi, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diintegrasikan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang efisien, efektif, dan berkualitas. Nilai-nilai Islam seperti amanah (kepercayaan dan tanggung jawab) diharapkan dapat mendukung profesionalisme dan akuntabilitas di lingkungan kerja birokrasi. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini akan menganalisis berbagai literatur dan regulasi yang relevan, serta menguraikan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam konteks reformasi birokrasi di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan solusi praktis mengenai peran hukum Islam dalam menciptakan birokrasi yang lebih baik dan pelayanan publik yang lebih berkualitas.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Integrasi nilai islam dalam praktik reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan public

Penerapan teori etika Islam dalam Reformasi Birokrasi dapat membantu menciptakan birokrasi yang bersih, efisien, dan akuntabel. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan.²⁸ Teori etika Islam menawarkan panduan moral yang berharga untuk membangun sistem birokrasi dan pelayanan publik yang lebih baik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam, kita dapat menciptakan pemerintahan yang adil, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Aspek hukum yang mendasari penerapan etika Islam dalam reformasi birokrasi mencakup teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Teori hukum Islam, seperti Syariah dan Fiqh, memberikan kerangka kerja normatif yang dapat digunakan untuk menilai dan mengarahkan praktik birokrasi. Syariah, sebagai hukum ilahi, menetapkan prinsip-prinsip umum keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan yang dapat dijadikan acuan dalam pembuatan kebijakan dan peraturan. Fiqh, atau jurisprudence Islam,

²⁸ Huda, A. (2010). EPISTEMOLOGI GERAKAN LIBERALIS, FUNDAMENTALIS, DAN MODERAT ISLAM DI ERA MODERN. *De Jure*, 2(2). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v2i2.2977>

menawarkan interpretasi dan aplikasi praktis dari prinsip-prinsip Syariah yang dapat disesuaikan dengan konteks birokrasi modern.

Selain itu, peraturan perundang-undangan nasional juga memainkan peran penting dalam mendukung reformasi birokrasi yang berlandaskan etika Islam. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, misalnya, menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengatur tata tertib dan kode etik yang harus dipatuhi oleh aparatur sipil negara untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.²⁹ Implementasi peraturan ini dapat diperkuat dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan amanah, sehingga birokrasi dapat berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dengan demikian, penerapan teori etika Islam dalam reformasi birokrasi tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, tetapi juga mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Hal ini akan berdampak positif pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendorong pembangunan nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.³⁰

Teori etika Islam merupakan kerangka kerja yang mendalami konsep-konsep moral dan etis dalam Islam yang berakar pada Al-Quran, Hadits, dan ajaran ulama. Etika Islam menggarisbawahi nilai-nilai seperti keadilan (*ʿadl*), kejujuran (*sidq*), dan akuntabilitas (*mas'uliyah*), yang sangat relevan dalam membangun budaya birokrasi yang transparan dan profesional.³¹ Penelitian mengenai etika Islam dalam konteks reformasi birokrasi dapat mencakup sejauh mana prinsip-prinsip ini diterapkan oleh aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada publik.³² Sebagai contoh, teori etika Islam yang diajarkan oleh Al-Ghazali, yang menekankan pentingnya niat dan akhlak individu, dapat menjadi acuan dalam upaya meningkatkan profesionalisme.³³ Kepatuhan terhadap etika Islam dalam pemerintahan tidak hanya membantu dalam penyediaan layanan yang adil dan bertanggung jawab, tetapi juga mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan dan inklusif. Implementasi nilai-nilai ini bisa membawa transformasi dalam sistem pelayanan publik, mendorong

²⁹ Omar, N., Muda, Z., Disa, M N., Nasir, N S M., Mohamed, N., & Razali, K. (2021). An Islamic Perspective Review on Organizational Ethics. *Revista GEINTEC*, 11(4), 5549-5563. <https://doi.org/10.47059/revistageintec.v11i4.2578>

³⁰ Huda, A. (2010). EPISTEMOLOGI GERAKAN LIBERALIS, FUNDAMENTALIS, DAN MODERAT ISLAM DI ERA MODERN. *De Jure*, 2(2). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v2i2.2977>

³¹ Islamic Approach to Business Ethics. (2009). <https://www.slideshare.net/AlHaqqNetwork/islamic-approach-to-business-ethics>

³² Faiz Musthofa Abbas, "Etika Islam : Telaah Buku ' Antara Al -Ghazali Dan Kant : Filsafat Etika Islam ' Abstract ; Abstrak ; A . Pendahuluan Filsafat Adalah Cara Berpikir , Yaitu Berpikir Kritis , Analitis , Dan Sistematis . Itu Lebih Banyak Tentang " Proses " Daripada Tentang " 6, no. 1 (2024): 57–72.

³³ Ahmad Syafiq, "Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Konsumen Dalam Pandangan Islam," *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2019): 96–113, <https://doi.org/10.29062/faqih.v5i1.54>.

birokrat untuk menjalankan tugasnya dengan integritas dan dedikasi yang tinggi demi kesejahteraan bersama.³⁴

Dalam konteks reformasi birokrasi di Indonesia, teori etika Islam dapat berperan penting dalam membentuk perilaku dan tata kelola yang baik dalam pelayanan publik. Misalnya, prinsip keadilan dalam Islam mendorong distribusi sumber daya dan peluang yang adil bagi semua warga tanpa diskriminasi.³⁵ Penerapan ini tercermin dalam kebijakan rekrutmen pegawai negeri yang transparan dan berbasis merit, serta dalam proses pengambilan keputusan yang mempertimbangkan kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.³⁶ Dengan mendasarkan tindakan pada nilai-nilai keadilan, birokrasi dapat lebih adil dan menghindari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang seringkali mengganggu pelayanan publik.³⁷

Selanjutnya, konsep akuntabilitas dalam etika Islam mengharuskan aparatur sipil negara untuk bertanggung jawab atas amanah yang diberikan kepada mereka. Ini berarti bahwa setiap pejabat publik harus dapat mempertanggungjawabkan tugas-tugas mereka kepada masyarakat dan Allah melalui praktik-praktik seperti transparansi anggaran, pelaporan kinerja, dan mekanisme pengaduan publik.³⁸ Tak hanya itu, profesionalisme dalam layanan publik yang diperintahkan oleh nilai-nilai Islam dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi. Pengembangan kompetensi dan peningkatan kapasitas individu aparatur sipil negara melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan akan mendukung reformasi birokrasi di Indonesia sesuai dengan prinsip etika Islam.

Sebagai contoh kasus yang lebih detail dan terbaru yang tidak mencerminkan teori etika Islam dalam konteks birokrasi, kita bisa melihat kasus korupsi yang melibatkan seorang pejabat tinggi di Indonesia. Pada tahun 2020, mantan Menteri Sosial Juliari Batubara ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi dalam pengadaan bantuan sosial Covid-19. Juliari diduga menerima suap sebesar Rp 17 miliar dari pengadaan paket sembako untuk masyarakat terdampak pandemi. Kasus ini mencerminkan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip etika Islam, seperti keadilan, kejujuran, dan amanah. Dalam Islam, amanah merujuk pada tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang yang harus dijaga dan dijalankan dengan baik. Pejabat

³⁴ Dodi Al, Ulung Pribadi, and Riri Maria, "The Satisfaction Level Analysis of the SIKOJA Application ' s Users in Jambi City during the COVID-19 Pandemic" 15, no. 1 (2023): 144–52.

³⁵ Hendriyadi Hendriyadi and Musnaini Musnaini, "Analisis Pengaruh Pelayanan Publik Dan E-Service Quality Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintahan Kota Jambi," *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan* 10, no. 01 (2021): 87–98, <https://doi.org/10.22437/jmk.v10i01.12531>.

³⁶ Yusriadi Yusriadi and Umi Farida, "Bureaucracy Performance in Public Services in Indonesia," *Jurnal Ad'ministrare* 6, no. 1 (2019): 17, <https://doi.org/10.26858/ja.v6i1.9434>.

³⁷ Weni Sofianur, "EFEKTIVITAS INOVASI PELAYANAN PENCEGAHAN COVID DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA JAMBI BERBASIS APLIKASI DI MASA PANDEMI" (2023).

³⁸ Cahyati, A D., Risa, N., Alim, N., & Prasetyono, P. (2020, January 1). Islamic University Accountability Model: In Islamic Values Perspective. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200522.025>

publik memegang amanah dari masyarakat untuk mengelola sumber daya dan kebijakan demi kemaslahatan umum.

Tindakan Juliari yang menyalahgunakan jabatannya untuk menerima suap adalah pelanggaran langsung terhadap prinsip amanah, karena ia tidak menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Keadilan adalah prinsip utama dalam hukum dan etika Islam, yang menekankan distribusi sumber daya dan keadilan sosial yang merata. Korupsi dalam pengadaan bantuan sosial mengganggu distribusi yang adil dari sumber daya yang seharusnya membantu masyarakat yang membutuhkan selama pandemi. Ini menciptakan ketidakadilan yang besar di kalangan masyarakat. Islam juga mengajarkan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam setiap tindakan, terutama bagi mereka yang memegang posisi kekuasaan. Tindakan korupsi yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak jujur oleh Juliari Batubara menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip transparansi dan kejujuran.

Kasus ini juga melanggar berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi dan menetapkan sanksi bagi pelaku korupsi, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang menyempurnakan aturan dan sanksi terkait korupsi. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil juga mengatur disiplin dan etika bagi aparatur sipil negara, termasuk larangan menerima suap atau gratifikasi. Kasus korupsi oleh pejabat tinggi seperti ini menunjukkan pentingnya penerapan teori etika Islam dalam birokrasi. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam seperti amanah, keadilan, kejujuran, dan transparansi, pejabat publik dapat menjalankan tugas mereka dengan integritas dan memastikan pelayanan publik yang lebih baik dan berkeadilan. Ini juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

3.2 Penerapan nilai-nilai Islam dalam membawa perubahan signifikan dalam birokrasi di Indonesia

Teori manajemen Islam membahas tentang prinsip-prinsip dan praktik manajemen yang sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya keadilan, syura (konsultasi), musyawarah, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Memahami teori manajemen Islam penting untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam reformasi birokrasi.³⁹

Tujuan Mempelajari Teori Manajemen Islam

Mempelajari teori manajemen Islam bertujuan untuk:

³⁹ Al Maslahah Based Quality Management: A Theoretical Overview. (2016). <https://doi.org/10.3844/ajassp.2016.243.250>

- Meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip dan praktik manajemen yang sesuai dengan ajaran Islam.
- Menganalisis bagaimana prinsip-prinsip manajemen Islam dapat diterapkan dalam reformasi birokrasi.
- Mengembangkan model birokrasi yang ideal berdasarkan nilai-nilai Islam.
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi dalam menjalankan tugasnya.

Tokoh-Tokoh Pengembang Teori Manajemen Islam

Beberapa tokoh penting dalam pengembangan teori manajemen Islam antara lain:

- **Imam Al-Ghazali:** Beliau mengemukakan konsep "akhlakul karimah" yang menekankan pentingnya moralitas dan karakter mulia dalam kepemimpinan dan manajemen.
- **Ibnu Khaldun:** Beliau mengemukakan konsep "asabiyah" yang menekankan pentingnya solidaritas dan kerjasama dalam organisasi.
- **Muhammad Abduh:** Beliau mengemukakan konsep "ijtihad" yang menekankan pentingnya pemikiran kritis dan rasional dalam manajemen.
- **Maududi:** Beliau mengemukakan konsep "khilafah" yang menekankan pentingnya kepemimpinan yang adil dan berlandaskan syariat Islam.

Penerapan Teori Manajemen Islam dalam Reformasi Birokrasi di Indonesia

Di Indonesia, teori manajemen Islam telah diterapkan dalam berbagai upaya reformasi birokrasi, antara lain:

- **Pengembangan sistem meritokrasi:** Sistem ini didasarkan pada prinsip keadilan dan transparansi dalam pengangkatan dan promosi pegawai negeri sipil.
- **Pengembangan budaya kerja yang Islami:** Aparatur sipil negara diwajibkan untuk bekerja dengan penuh integritas, profesionalisme, dan etos kerja yang tinggi.
- **Peningkatan partisipasi masyarakat:** Masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik.

Dalam Penerapan teori manajemen Islam dalam reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang adil, transparan, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks ini, beberapa arahan birokrasi yang ingin dicapai mencakup peningkatan keadilan dan transparansi, efisiensi dan efektivitas, pengembangan budaya kerja Islami, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Untuk mencapai birokrasi yang adil dan transparan, setiap keputusan harus diambil berdasarkan prinsip keadilan dan keterbukaan, khususnya dalam pengangkatan dan promosi pegawai yang harus didasarkan pada meritokrasi dan bukan nepotisme atau favoritisme. Hal ini dapat didukung melalui revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara untuk memperkuat sistem meritokrasi dan transparansi.

Selain itu, peningkatan efisiensi dan efektivitas birokrasi dapat dicapai dengan memastikan bahwa setiap pegawai bekerja dengan integritas, profesionalisme, dan etos

kerja yang tinggi. Proses kerja harus disederhanakan dan dioptimalkan untuk menghindari pemborosan sumber daya. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil perlu direvisi untuk memasukkan indikator kinerja yang lebih ketat dan sistem penghargaan serta sanksi yang jelas. Selanjutnya, pengembangan budaya kerja Islami yang mencakup nilai-nilai seperti integritas, akuntabilitas, dan musyawarah akan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Untuk itu, diperlukan Peraturan Menteri yang secara khusus mengatur tentang nilai-nilai budaya kerja Islami dan implementasinya di lingkungan birokrasi.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik juga sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hal ini dapat didukung melalui peraturan baru atau revisi terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik untuk memperkuat partisipasi masyarakat. Dalam rangka mewujudkan arahan-arahan tersebut, diperlukan tindakan seperti pembuatan peraturan baru yang mendukung penerapan nilai-nilai Islam dalam birokrasi, revisi peraturan perundang-undangan yang memperkuat sistem meritokrasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta peningkatan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi peraturan yang telah disesuaikan. Dengan demikian, idealitas dalam teori manajemen Islam diharapkan dapat terwujud, menciptakan birokrasi yang lebih efisien, efektif, adil, transparan, dan akuntabel. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Sebagai

Sebagai contoh Penerapan Teori Manajemen Islam dalam Reformasi Birokrasi adalah di Kementerian Agama Republik Indonesia. Reformasi Birokrasi di tubuh Kementerian Agama sebenarnya telah dimulai sejak pertama kali didirikan pada tanggal 03 Januari 1946 dengan semboyan "Ikhlas Beramal" yang artinya aparatur Kementerian Agama dalam mengabdikan kepada masyarakat, bangsa dan negara berlandaskan niat beribadah dengan tulus dan ikhlas. Namun secara internal kelembagaan, proses reformasi birokrasi di tubuhh Kementerian Agama telah dimulai sejak tahun 2009 melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 153 Tahun 2009 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Agama. Kemudian tahun 2010 reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Agama telah dilaksanakan dengan ditetapkannya Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Agama 2010-2014 yang disusun sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.

Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi di jajaran Kementerian Agama dibuktikan pula dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama, Keputusan Menteri Agama Nomor 158 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Agama, Keputusan Menteri Agama Nomor 536 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama yang

kemudian diperbarui dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 633 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Agama, serta peraturan perundang-undangan yang menyertainya. Maka dari itu teori manajemen Islam merupakan teori penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterapkan dalam reformasi birokrasi. Penerapan teori manajemen Islam dapat membantu membangun birokrasi yang adil, transparan, akuntabel, dan profesional, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi dalam menjalankan tugasnya.⁴⁰

Dalam konteks teori manajemen Islam, prinsip-prinsip seperti syura (konsultasi), musyawarah (musyawarah kolektif atau deliberasi), dan transparansi adalah kunci untuk memastikan kepatuhan pada etika Islam dalam pengelolaan organisasi. Penerapan prinsip-prinsip ini didasarkan pada model kepemimpinan dan tata kelola yang adil dan inklusif, di mana pengambilan keputusan dilakukan melalui konsultasi bersama dan dengan pertimbangan yang cermat terhadap kepentingan bersama.⁴¹

4. Kesimpulan

Agama Islam memiliki potensi signifikan dalam mendorong reformasi birokrasi, yang dapat mengarah pada peningkatan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik. Nilai-nilai Islam seperti integritas, akuntabilitas, dan transparansi, jika diintegrasikan dalam sistem birokrasi, bisa membentuk etos kerja yang lebih profesional dan adil. Implementasi prinsip-prinsip syariah dalam proses pengambilan keputusan dan administrasi negara berpotensi meminimalisir perilaku koruptif dan meningkatkan kinerja aparatur sipil negara dalam melayani masyarakat.

Dalam konteks pembaharuan birokrasi, penerapan teori etika dan manajemen Islam dalam reformasi birokrasi sangat penting untuk menciptakan birokrasi yang adil, transparan, efisien, dan akuntabel. Teori etika Islam, yang berakar pada prinsip-prinsip Syariah dan Fiqh, menawarkan kerangka kerja normatif yang dapat mengarahkan praktik birokrasi menuju keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan masyarakat. Implementasi nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, amanah, dan transparansi tidak hanya membantu dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi menunjukkan pentingnya penerapan nilai-nilai ini untuk mencegah penyimpangan dan memastikan distribusi sumber daya yang adil. Reformasi birokrasi di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Kementerian Agama, menunjukkan bahwa dengan dukungan peraturan perundang-undangan yang relevan dan komitmen

⁴⁰ Solehuddin, M. (2018). Manajemen Pendidikan Islam dan Implikasinya. *Risda*, 2(1), 10-25. <https://doi.org/10.59355/risda.v2i1.2>

⁴¹ Purnama, C. (2017). Islamic Culture Impact of Increasing Satisfaction and Performance of Employees: Study of Educational Institutions Sabillilah Sampang. <https://archive.aessweb.com/index.php/5002/article/view/1574>

terhadap nilai-nilai Islam, birokrasi yang bersih dan profesional dapat diwujudkan. Dengan demikian, penerapan teori manajemen Islam tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik tetapi juga mendukung terciptanya pemerintahan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Hal ini akan berdampak positif pada kepercayaan masyarakat dan mendorong pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Adyawardman, A. (2021). The Challenges of Public Innovation: Insights From Risk Governance in Batang Regency. JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)/JKAP. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, 25(1), 1-1. <https://doi.org/10.22146/jkap.62314>
- Al Masalahah Based Quality Management: A Theoretical Overview. (2016). <https://doi.org/10.3844/ajassp.2016.243.250>
- Abbas, Faiz Musthofa. "Etika Islam: Telaah Buku ' Antara Al -Ghazali Dan Kant : Filsafat Etika Islam ' Abstract; Abstrak; A . Pendahuluan Filsafat Adalah Cara Berpikir , Yaitu Berpikir Kritis , Analitis , Dan Sistematis . Itu Lebih Banyak Tentang " Proses " Daripada Tentang " 6, no. 1 (2024): 57-72.
- Abinda Firdaus, Imansyah, and Arnidiana Arnidiana. "Strategi Kota Bekasi Dan Kota Jambi Dalam Pengembangan Inovasi Digital Dan Kreativitas Masyarakat." *Jurnal Studi Inovasi* 1, no. 1 (January 29, 2021): 22-27. <https://doi.org/10.52000/jsi.v1i1.4>.
- Ahmad Syafiq. "Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Konsumen Dalam Pandangan Islam." *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2019): 96-113. <https://doi.org/10.29062/faqih.v5i1.54>.
- Al, Dodi, Ulung Pribadi, and Riri Maria. "The Satisfaction Level Analysis of the SIKOJA Application ' s Users in Jambi City during the COVID-19 Pandemic" 15, no. 1 (2023): 144-52.
- Asif, Aymen, and Kashif Rathore. "Behavioral Drivers of Performance in Public-Sector Organizations: A Literature Review." *SAGE Open* 11, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.1177/2158244021989283>.
- Asmarani, Anugrah. "Analisis Akuntabilitas Birokrasi Pemerintahan: Studi Kasus Dalam Meningkatkan Efektivitas Layanan Publik," 2023, 1-38.
- Cahyati, A D., Risa, N., Alim, N., & Prasetyono, P. (2020). Islamic University Accountability Model: In Islamic Values Perspective. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200522.025>
- Cohen, Nissim, and Uri Hertz. "Street-Level Bureaucrats' Social Value Orientation On and Off Duty." *Public Administration Review* 80, no. 3 (2020): 442-53. <https://doi.org/10.1111/puar.13190>.
- Dunan, Amri. "Government Communications in Digital Era: Public Relation and Democracy." *Journal Pekommas* 5, no. 1 (2020): 71. <https://doi.org/10.30818/jpkm.2020.2050108>.
- Haryanti, A S., Samosir, A., & Nafilah, I. (2018). Pemberdayaan Relawan Balaraja melalui Pelatihan Menulis Karya Ilmiah dan Menulis Sastra. *Deleted Journal*, 1(03), 191-191. <https://doi.org/10.30998/jurnalpkm.v1i03.2550>

- Huda, A. (2010). EPISTEMOLOGI GERAKAN LIBERALIS, FUNDAMENTALIS, DAN MODERAT ISLAM DI ERA MODERN. *De Jure*, 2(2). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v2i2.2977>
- Halim, Farhan Rahmawan, Feni Astuti, and Khaerul Umam. "Implementasi Prinsip Agile Governance Melalui Aplikasi PIKOBAR Di Provinsi Jawa Barat." *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik* 7, no. 1 (2021): 48-67.
- Hartati, Ita. "Strategi Pembangunan Sdm Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Era Disrupsi 4.0." *Jurnal BPPK : Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan* 13, no. 1 (2020): 109-29. <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v13i1.493>.
- Hendriyadi, Hendriyadi, and Musnaini Musnaini. "Analisis Pengaruh Pelayanan Publik Dan E-Service Quality Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintahan Kota Jambi." *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan* 10, no. 01 (2021): 87-98. <https://doi.org/10.22437/jmk.v10i01.12531>.
- Islamic Approach to Business Ethics. (2009). <https://www.slideshare.net/AlHaqqNetwork/islamic-approach-to-business-ethics>
- Kurniawan, Danar Ilham, Akbar Maulana, and Itok Wicaksono. "Agile Governance Sebagai Bentuk Transformasi Inovasi Pemerintah Daerah." *Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Jember*, 2021, 1-9.
- Kalantari, B. (1998). In search of a public administration paradigm: is there anything to be learned from islamic public administration?. *International journal of public administration*, 21(12), 1821-1861. <https://doi.org/10.1080/01900699808525370>
- Muchtarom, M., & Selamat, A Z. (2023). Civic values: Thematic studies on citizenship in Islam. *Jurnal Civics/Jurnal civics*, 20(1), 135-144. <https://doi.org/10.21831/jc.v20i1.58544>
- Novita, Dien. "Faktor-Faktor Penghambat Pengembangan E-Government." *Eksplora Informatika* 4, no. 1 (2014): 43-52. <https://eksplora.stikom-bali.ac.id/index.php/eksplora/article/view/94>.
- Omar, N., Muda, Z., Disa, M N., Nasir, N S M., Mohamed, N., & Razali, K. (2021). An Islamic Perspective Review on Organizational Ethics. *Revista GEINTEC*, 11(4), 5549-5563. <https://doi.org/10.47059/revistageintec.v11i4.2578>
- Optimization of Public Services. (2023). <https://ojs.unimal.ac.id/ijpas/article/viewFile/12328/5110>
- Pinilih, S A G., & Hikmah, S N. (2018). AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA TERHADAP HAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERIBADAH DI INDONESIA. *Masalah-masalah hukum*, 47(1), 40-40. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.40-46>
- Purnama, C. (2017). Islamic Culture Impact of Increasing Satisfaction and Performance of Employees: Study of Educational Institutions Sabillilah Sampang. <https://archive.aessweb.com/index.php/5002/article/view/1574>
- Prasodjo, Tunggul. "Paradigma Humanis Dalam Pelayanan Publik." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 7, no. 1 (2017): 38. <https://doi.org/10.26858/jiap.v7i1.3438>.
- Rohman, M N., & Rismana, D. (2021). Kebijakan Pemangkasan Struktur Birokrasi di Indonesia. *Volksgeist*, 4(2), 2021-232. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i2.5232>

- Rosilawati, Y., & Amanullah, F M. (2021). Cultivating an Attitude of Professionalism Based on Prophetic Value. *Edukasi: Jurnal Pendidikan Islam/Edukasi: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 139-152. <https://doi.org/10.54956/edukasi.v9i2.31>
- Rahayu, Ragil Fitri, and Ibrahim Ibrahim. "Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka." *Jurnal Studi Inovasi* 3, no. 1 (January 30, 2023): 118-31. <https://doi.org/10.52000/jsi.v3i1.128>.
- Siregar, F Y. (2020). Perception of Public Islam on Performance and Providing Public Services in Padangsidempuan City. *Al-Lubb/al-Lubb*, 2(1), 78-78. <https://doi.org/10.51900/lubb.v2i1.8591>
- Solehuddin, M. (2018, February 8). Manajemen Pendidikan Islam dan Implikasinya. *Risda*, 2(1), 10-25. <https://doi.org/10.59355/risda.v2i1.2>
- Saputro, Hendra Nugroho. *Inovasi Pelayanan Pada Organisasi Publik. Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*. Vol. 26, 2023. <https://doi.org/10.31845/jwk.v26i1.823>.
- Sayuri, Egarvanda. "Transformasi Digital, Pelayanan Publik Di Masa Pandemi." *Ekasakti Educational Journal* 1, no. 2 (2021): 278-92.
- Sofianur, Weni. "Efektivitas Inovasi Pelayanan Pencegahan Covid Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Jambi Berbasis Aplikasi Di Masa Pandemi," 2023.
- Tiaranika, Usy, and Maesaroh Maesaroh. "Inovasi Pelayanan Superone (Surat Pengantar Online) Di Kecamatan Candisari Kota Semarang." *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 2, no. 2 (2020): 160-75. <https://doi.org/10.14710/dialogue.v2i2.9942>.
- Wiryanto, W. (2020). Population Administration Service Innovation in Indonesia During the Covid-19 Pandemic. *Proceedings IAPA Annual Conference*, 512-512. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2020.425>
- Wirawan, Vani. "Penerapan E-Government Dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer Di Indonesia." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, no. 1 (2020): 1-16. <https://doi.org/10.18196/jphk.1101>.
- Yanti, Ovie. "Transformasi Pelayanan Publik Digital Di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan e-Government Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Jambi." *Jurnal Paradigma Ekonomika* 17, no. 3 (2022): 2085-1960.
- Yusriadi, Yusriadi, and Umi Farida. "Bureaucracy Performance in Public Services in Indonesia." *Jurnal Ad'ministrare* 6, no. 1 (2019): 17. <https://doi.org/10.26858/ja.v6i1.9434>.
- Zarychta, Alan, Tara Grillos, and Krister P. Andersson. "Public Sector Governance Reform and the Motivation of Street-Level Bureaucrats in Developing Countries." *Public Administration Review* 80, no. 1 (2020): 75-91. <https://doi.org/10.1111/puar.13132>.